

IMPLEMENTASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN DALAM PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA STUDI KASUS LAPORAN KEUANGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 - 2024

Nurhadi^{1*}, Muh. Arief Noor², Muhamad Ridwan³

¹⁻²⁻³ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha, Indonesia

Email: 1didin.031176@gmail.com , 2ariefnoor319@gmail.com , 3ridwan@stieganessa.ac.id

*) Nurhadi

Abstrak

Received: 24 April 2026

Revised: 27 April 2026

Accepted: 29 April 2026

Published online:

Penelitian ini memiliki kebaruan pada pendekatan integratif yang menggabungkan pengelolaan persediaan Barang Milik Negara (BMN), implementasi sistem aplikasi keuangan terintegrasi (SAKTI), serta peran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pada institusi perpustakaan pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pengelolaan persediaan, implementasi SAKTI, dan penerapan SPIP terhadap kualitas laporan keuangan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan analisis tematik. Hasil empiris menunjukkan bahwa implementasi sistem keuangan terintegrasi mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta keandalan data aset dan laporan keuangan. Namun, efektivitasnya belum optimal akibat keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, belum maksimalnya pemanfaatan teknologi, dan perlunya penguatan dukungan manajemen. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi sistem, serta penguatan pengendalian internal sebagai strategi dalam mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah yang lebih baik dan berkelanjutan.

Kata Kunci:

Pengelolaan BMN; SAKTI; SPIP; Laporan Keuangan; Akuntabilitas

PENDAHULUAN

Perpustakaan mempunyai suatu arti sebagai tempat yang didalamnya terdapat sebuah kegiatan penghimpunan, pengelolaan, penyebarluasan (pelayanan) segala macam informasi, baik secara tercetak maupun terekam dalam berbagai media atau buku, majalah, surat kabar, film, kaset, tape recorder, video, computer, dan lain-lain (Rochmah, 2016)

Menurut rancangan undang-undang (RUU) Perpustakaan Bab I Pasal 1 menyatakan perpustakaan adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam, mengelolanya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya melalui beragam cara interaksi pengetahuan (Kusmawati & Anas, 2021)

Seperti tercantum dalam Keputusan Presiden RI Nomer 11, disebutkan bahwa “perpustakaan merupakan salah satu sarana pelestarian bahan pustaka sebagai hasil budaya dan mempunyai fungsi sebagai sumber informasi ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional (Nugraha, 2013)

Ada dua unsur utama dalam perpustakaan, yaitu buku dan ruangan. Namun, di zaman sekarang koleksi sebuah perpustakaan tidak hanya terbatas berupa buku-buku, tetapi bias berupa film, slide, atau lainnya, yang dapat diterima di perpustakaan sebagai sumber informasi. Kemudian semua sumber informasi itu diorganisir, disusun teratur, sehingga ketika kita membutuhkan suatu informasi, kita dengan mudah dapat menemukannya (Rahma, 2018)

Menurut (Edowai, 2021), perpustakaan adalah Gedung atau ruangan yang berisi rak buku, dan mengalami perubahan definisi karena dipengaruhi oleh komponen koleksi dan perkembangan teknologi, sehingga dalam perkembangannya muncul pengertian perpustakaan elektronik, multimedia, hibrida, perpustakaan maya (*virtual library*) dan perpustakaan tanpa tembok (*libraries without wall*) (Hakim & Hadiapurwa, 2022)

Pendapat (Arif Anggara, 2023), perpustakaan adalah sebuah ruangan, bagian sebuah gedung ataupun gedung itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu untuk digunakan pembaca, bukan untuk dijual. Perpustakaan adalah mencakup suatu ruangan, bagian dari gedung/bangunan atau gedung tersendiri yang berisi buku-buku koleksi, yang diatur dan disusun sedemikian rupa, sehingga mudah untuk dicari dan dipergunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh pembaca. Melalui layanan perpustakaan yang baik mampu menciptakan dan memantapkan kebiasaan membaca masyarakat, mendukung Pendidikan perorangan secara mandiri maupun Pendidikan formal juga memberikan kesempatan atau stimulasi bagi pengembangan kreativitas dan imajinasi pribadi maupun masyarakat (Fatmawati, 2021)

Menurut IFLA (*International of Library Associations and Institutions*) perpustakaan merupakan kumpulan bahan tercetak dan non tercetak dan atau sumber informasi dalam computer yang tersusun secara sistematis untuk kepentingan pemakai (Syafrial Pane, dkk, 2020 : 1). (Dahlia, 2021), perpustakaan adalah suatu ruangan, bagian dari gedung/bangunan, atau Gedung itu sendiri, yang berisi buku-buku koleksi, yang disusun dan diatur sedemikian rupa sehingga mudah dicaridan dipergunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk pembaca. Menurut (Fadirubun, 2024), perpustakaan adalah suatu unit kerja yang berupa tempat

menyimpan koleksi bahan pustakayang diatur secara sistematis dengan cara tertentuuntuk digunakan secara berkesinambungan oleh pemakainya sebagai sumber informasi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perpustakaan berasal dari kata dasar pustaka yang berarti pustaka atau buku. Perpustakaan artinya kumpulan buku (bacaan dsb); bibliotek (Aprilia, 2024). Dalam UU No. 43 tahun 2007 tentang bahwa : perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara professional dengan system yang baku guna memenuhi kebutuhan Pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka (Helmy, 2022).

Sejak awal 1990an, banyak negara beralih dari model pemerintahan formal (*rulling government*) ke tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Pergeseran ini bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keadilan dalam administrsi publik (Hiplunudin, 2025).

Standar akuntansi pemerintahan merupakan pedoman yang digunakan dalam pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi keuangan dilingkungan pemerintahan guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik (Wibisono & Wibisono, 2024). Menurut PP No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP), sistem ini mengatur pencatatan berbasis akrual untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan pemerintah (Prayogo et al., 2023).

Tatantangan dalam penerapan akuntansi pemerintahan meliputi kompleksitas regulasi, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, serta resistensi terhadap perubahan sisten pencatatan berbasis akrual (Sitanggung et al., 2025). Penyusunan laporan keuangan dilakukan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan suatu entitas pemerintahan dalam dalam satu periode tertentu, termasuk informasi mengenai penerimaan, pengeluaran, aset, kewajiban, serta perubahan ekuitas. Proses ini harus mengikuti prinsip dan standar akuntansi yang telah ditetapkan agar dapat diandalkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan. Lapran keuangan pemerintah terdiri dari berbagai komponen utama seperti laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan yang berfungsi untuk memberikan penjelasan lebih rinci mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan (Yalabi, 2021).

Perubahan dan perkembangan teknologi juga terjadi di sektor tata kelola pemerintahan, tujuan utamanya berkaitan dengan terpaan perkembangan teknologi serta informasi yang dapat mempermudah penyelenggaraan pemerintahan secara profesional dan juga efektif (*good governance*). Kuncinya dalam penyelenggaraan pemerintahan yakni : upaya yang dilakukan pemerintah supaya menjadi lebih efektif, efisien, transparan yang mampu mensinergikan komunikasi yang seimbang antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta (Ma'ruf et al., 2024).

Tugas Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) mencakup beberapa aspek penting, yaitu: mengelola barang milik negara dengan cara yang transparan dan akuntabel, melakukan pencatatan, penginventarisasian, dan pelaporan barang milik negara agar data yang tersedia akurat dan terkini, serta melaksanakan pemeliharaan dan perawatan untuk memastikan keberlangsungan dan kualitas koleksi

perpustakaan. Selain itu, Perpustakaan Nasional diharapkan mengoptimalkan penggunaan barang milik negara dalam mendukung program dan layanan perpustakaan kepada masyarakat, menyusun laporan berkala mengenai pengelolaan BMN yang mencakup informasi tentang kondisi, penggunaan, dan penghapusan barang, serta melaksanakan kegiatan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan dan pemanfaatan barang milik negara.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Perpustakaan Nasional. Berdasarkan hal tersebut pengelolaan BMN Perpustakaan Nasional yang selanjutnya disebut Pengelolaan BMN adalah serangkaian kegiatan untuk mewujudkan terkelolanya barang milik negara di lingkungan Perpustakaan Nasional secara tertib, sistematis, dan akuntabel. Pengelolaan BMN meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Berdasarkan pada laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan Perpustakaan Nasional RI tahun 2024. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan adanya tindak lanjut temuan-temuan dan upaya melakukan percepatan dari tahun 2019 hingga 2024 diantaranya masih adanya permasalahan dalam pengelolaan barang milik negara. Dalam hal pengelolaan dan penatausahaan persediaan dan aset khususnya pengelolaan persediaan, hibah barang milik negara (BMN) diserahkan ke masyarakat, sistem pengendalian intern dan kepatuhan, pengelolaan aset tetap dan aset lainnya.

Perkembangan laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh tingkat kemajuan suatu negara, khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan dan stabilitas politik. Negara yang maju dan menerapkan sistem demokrasi cenderung menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas karena didukung oleh penerapan prinsip *good governance*, seperti akuntabilitas dan transparansi (Pratama, 2025).

Akuntabilitas menuntut pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan pengelolaan anggaran kepada masyarakat, sedangkan transparansi mengharuskan adanya keterbukaan informasi yang mudah diakses oleh publik. Dalam rangka mendukung hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan, mengembangkan upaya simplifikasi pelaporan keuangan melalui implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) berbasis web. Aplikasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan proses pengelolaan keuangan yang sebelumnya terpisah menjadi satu sistem yang lebih efisien, meskipun dalam implementasinya masih menghadapi tantangan seperti kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia (Noor, 2025).

Dalam konteks pengelolaan aset negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) memiliki peran strategis dalam mengelola barang milik negara (BMN), yang merupakan seluruh aset yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau sumber sah lainnya (Widi Widayat, 2026). Pengelolaan BMN mencakup siklus lengkap mulai dari penggunaan,

pemanfaatan, hingga penatausahaan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Seluruh proses tersebut bermuara pada penyusunan Laporan Barang Milik Negara (LBMN) yang menjadi bagian penting dalam penyusunan Neraca Pemerintah Pusat. Penatausahaan BMN bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi serta memastikan data aset yang akurat, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat mendukung pengambilan kebijakan serta meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Barang persediaan sebagai bagian dari BMN merupakan aset lancar yang memiliki peranan penting dalam mendukung operasional pemerintah. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 5, persediaan mencakup barang yang digunakan dalam kegiatan operasional maupun yang akan diserahkan kepada masyarakat. Pengelolaan persediaan meliputi pencatatan, pengendalian, dan pelaporan secara sistematis guna memastikan ketersediaan barang serta mendukung penyusunan laporan keuangan yang andal. Dengan pengelolaan yang baik, satuan kerja dapat melakukan perencanaan kebutuhan secara lebih akurat dan menghindari ketergantungan pada estimasi semata.

Barang milik negara secara umum mencakup berbagai aset seperti tanah, bangunan, peralatan, dan inventaris lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan (Rachman, 2023). Pengelolaannya dilakukan melalui proses pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna menjamin efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas penggunaan aset. Penatausahaan yang baik akan menghasilkan informasi yang akurat untuk penyusunan neraca pemerintah dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Laporan keuangan negara merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan keuangan publik yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan ini mencakup berbagai komponen seperti Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CMA, 2024). Kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari karakteristiknya yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami, serta dari opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Peningkatan kualitas laporan keuangan tidak terlepas dari pengelolaan BMN yang baik, karena aset merupakan komponen penting dalam penyusunan laporan tersebut (Hadyan & Primastuti, 2025).

Implementasi aplikasi SAKTI sebagai sistem terintegrasi dalam pengelolaan keuangan negara memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi data. Sistem ini mengintegrasikan berbagai proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan dalam satu basis data terpusat, sehingga mengurangi duplikasi pekerjaan administratif (Pandini et al., 2025). Dengan demikian, SAKTI menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung transformasi digital dan peningkatan kualitas tata kelola keuangan negara.

Selanjutnya, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memiliki peran krusial dalam memastikan efektivitas penatausahaan barang persediaan dan BMN. SPIP mencakup berbagai unsur seperti lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan (Fadirah et al., 2025). Penerapan SPIP yang optimal mampu

meningkatkan keandalan pelaporan keuangan, melindungi aset negara, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, integrasi antara pengelolaan BMN, sistem aplikasi keuangan, dan SPIP menjadi kunci dalam mewujudkan laporan keuangan pemerintah yang transparan, akuntabel, dan berkualitas tinggi.

Kesenjangan penelitian perdebatan akademis dalam terletak pada perbedaan antara kerangka normatif dan realitas empiris dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) serta penyusunan laporan keuangan pemerintah. Secara normatif, berbagai regulasi seperti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), implementasi sistem digital seperti SAKTI, serta penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diyakini mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Namun, temuan empiris seperti laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan masih adanya permasalahan dalam pengelolaan persediaan, penatausahaan aset, serta kepatuhan terhadap regulasi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan teoritis dengan praktik di lapangan. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek akuntansi keuangan atau implementasi sistem secara umum, sementara kajian yang secara spesifik mengintegrasikan pengelolaan persediaan BMN, implementasi SAKTI, dan efektivitas SPIP dalam satu kerangka analisis yang komprehensif masih relatif terbatas, khususnya pada konteks lembaga seperti Perpustakaan Nasional.

Kebaruan (novelty) dalam penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menggabungkan tiga aspek utama, yaitu pengelolaan persediaan sebagai bagian dari BMN, implementasi sistem aplikasi keuangan terintegrasi (SAKTI), serta peran SPIP dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung mengkaji variabel-variabel tersebut secara parsial, penelitian ini berupaya membangun hubungan konseptual yang lebih holistik dengan menempatkan ketiga aspek tersebut sebagai faktor yang saling berinteraksi dalam mendukung kualitas pelaporan keuangan. Selain itu, konteks penelitian yang difokuskan pada institusi perpustakaan pemerintah juga memberikan perspektif baru, mengingat sektor ini memiliki karakteristik unik dalam pengelolaan aset berupa koleksi pustaka dan persediaan lainnya yang tidak sepenuhnya sama dengan instansi pemerintah pada umumnya. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi baru baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan tata kelola keuangan sektor publik.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh pengelolaan persediaan barang milik negara, implementasi aplikasi SAKTI, dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana pengelolaan persediaan yang tertib dan sistematis mampu meningkatkan keandalan informasi keuangan, mengevaluasi efektivitas implementasi SAKTI dalam mendukung integrasi dan efisiensi pelaporan keuangan, serta mengkaji peran SPIP dalam memperkuat akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi. Melalui tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang relevan dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola

keuangan negara, khususnya dalam konteks pengelolaan aset dan pelaporan keuangan di lingkungan instansi pemerintah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena penatausahaan barang persediaan milik negara (BMN) dalam implementasi sistem aplikasi keuangan tingkat instansi serta implikasinya terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan kondisi empiris secara holistik, kontekstual, dan fleksibel, sehingga peneliti dapat memahami secara komprehensif praktik, kendala, serta dinamika yang terjadi di lapangan (Firdaus et al., 2022). Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan fokus pada pengungkapan makna, proses, dan hubungan antar variabel dalam konteks pengelolaan aset negara di lingkungan instansi pemerintah.

Penelitian dilaksanakan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang berlokasi di Jakarta Pusat, dengan waktu pelaksanaan selama tiga bulan, dimulai pada Oktober 2024. Tahapan penelitian meliputi fase persiapan, pengumpulan data, serta analisis dan pelaporan. Pada tahap persiapan, peneliti menyusun instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan melakukan wawancara eksploratif untuk memahami konteks awal penelitian. Selanjutnya, pada tahap pengumpulan data, peneliti melakukan pengumpulan data utama melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta studi dokumentasi terhadap laporan keuangan dan data persediaan. Pada tahap akhir, data yang telah terkumpul dianalisis secara sistematis untuk menghasilkan temuan penelitian yang relevan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan BMN, antara lain Kepala Sub Bagian Rumah Tangga, pengelola barang milik negara, pengelola keuangan, serta pengelola barang persediaan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive berdasarkan kompetensi, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam proses penatausahaan BMN. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi berupa laporan keuangan, kebijakan pengelolaan barang, laporan kinerja, serta dokumen administratif lainnya yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung untuk mengamati proses penatausahaan dan distribusi barang persediaan serta interaksi antar pelaku dalam sistem pengelolaan BMN. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi terkait tantangan pengelolaan, efektivitas sistem pengendalian intern, proses pencatatan aset, serta solusi yang dapat diterapkan dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan untuk melengkapi dan memverifikasi data yang diperoleh dari observasi dan wawancara.

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji melalui teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi dan kebenaran informasi. Selain itu, peneliti juga menerapkan teknik

member checking dan diskusi sejawat (*peer debriefing*) untuk meningkatkan validitas temuan. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data lebih menekankan pada kesesuaian antara data yang diperoleh dengan realitas yang terjadi di lapangan.

Proses analisis data dilakukan secara induktif menggunakan pendekatan analisis tematik. Tahapan analisis meliputi transkripsi data wawancara, reduksi data, pengkodean, pengelompokan tema, serta penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan diorganisasikan dan disederhanakan untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antar kategori yang relevan. Selanjutnya, peneliti melakukan interpretasi terhadap temuan dengan mengaitkannya pada teori dan regulasi yang berlaku, seperti pengelolaan BMN dan standar akuntansi pemerintahan. Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis guna memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi sistem aplikasi keuangan dalam penatausahaan barang persediaan milik negara serta dampaknya terhadap akuntabilitas laporan keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil utama penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem aplikasi keuangan tingkat instansi di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia secara empiris memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan. Sistem yang terintegrasi terbukti mampu meminimalkan kesalahan pencatatan, mempercepat proses penyusunan laporan, serta meningkatkan keteraturan dalam penatausahaan barang milik negara (BMN). Selain itu, pengelolaan persediaan yang dilakukan secara lebih sistematis melalui dukungan aplikasi tersebut berdampak pada meningkatnya akurasi data aset dan kemudahan dalam proses pengawasan. Namun demikian, temuan empiris juga mengungkap bahwa efektivitas implementasi sistem belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala berupa keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam pengoperasian sistem, belum maksimalnya pemanfaatan fitur teknologi, serta kebutuhan akan penguatan dukungan manajemen. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa keberhasilan peningkatan kualitas laporan keuangan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dan efektivitas pengendalian internal yang mendukung implementasinya.

Temuan empiris dalam penelitian ini sejalan dengan teori *good governance* yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik, serta mendukung konsep dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang menyatakan bahwa sistem berbasis akrual dan terintegrasi dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Hasil ini juga konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa penerapan sistem informasi keuangan pemerintah, seperti SAKTI, mampu meningkatkan keandalan dan ketepatan waktu laporan keuangan. Namun, di sisi lain, penelitian ini memperkuat temuan empiris dari studi terdahulu yang mengidentifikasi adanya kendala implementasi, khususnya terkait keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dan resistensi terhadap perubahan sistem. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi relevansi teori dan hasil penelitian sebelumnya, tetapi juga menegaskan adanya kesenjangan

antara kerangka normatif dan praktik di lapangan. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menunjukkan bahwa keberhasilan peningkatan kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh sinergi antara pengelolaan persediaan BMN, implementasi sistem aplikasi keuangan, dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), bukan oleh satu faktor tunggal secara parsial.

Latar penelitian ini berangkat dari perkembangan kelembagaan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang memiliki sejarah panjang sejak berdirinya *Bataviaasch Genootschap* pada tahun 1778 hingga menjadi lembaga pemerintah non-departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Transformasi kelembagaan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan peran perpustakaan sebagai pusat informasi, pelestarian budaya, serta pendukung pembangunan nasional. Seiring dengan perkembangan tersebut, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia juga mengalami peningkatan fungsi, tidak hanya sebagai penyedia layanan literasi, tetapi juga sebagai institusi yang dituntut untuk mengelola aset negara secara transparan, akuntabel, dan profesional sesuai dengan prinsip *good governance*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem aplikasi keuangan tingkat instansi di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia telah memberikan dampak positif, khususnya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Sebagian besar responden menyatakan bahwa sistem yang terintegrasi mampu mengurangi kesalahan pencatatan serta mempermudah proses pelaporan. Hal ini juga diperkuat oleh hasil observasi yang menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan menjadi lebih sistematis dan mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan. Selain itu, sistem yang diterapkan turut mendukung pengawasan terhadap barang milik negara sehingga pengelolaan aset menjadi lebih tertib dan efisien.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam implementasi sistem tersebut. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan pemahaman sumber daya manusia terhadap penggunaan aplikasi dan prosedur baru. Beberapa pegawai masih mengalami kesulitan dalam mengoperasikan sistem, yang berpotensi menghambat efektivitas pengelolaan keuangan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan kompetensi yang memerlukan perhatian serius melalui penyelenggaraan pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan. Hasil wawancara juga menegaskan bahwa kebutuhan pelatihan tidak hanya terkait aspek teknis penggunaan sistem, tetapi juga pemahaman terhadap regulasi dan prosedur akuntansi pemerintahan.

Selain faktor kompetensi, dukungan manajemen menjadi elemen penting dalam keberhasilan implementasi sistem keuangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktif manajemen dalam sosialisasi dan pendampingan mampu meningkatkan kepercayaan serta motivasi pegawai dalam beradaptasi dengan sistem baru. Komunikasi yang efektif antara manajemen dan staf juga terbukti mempercepat proses adaptasi serta membantu dalam penyelesaian permasalahan yang muncul selama implementasi. Oleh karena itu, sinergi antara pimpinan dan pegawai menjadi faktor kunci dalam menciptakan lingkungan kerja yang adaptif terhadap perubahan.

Dari sisi pemanfaatan teknologi, penelitian ini mengidentifikasi bahwa meskipun sistem aplikasi keuangan telah diterapkan, potensi teknologi informasi belum sepenuhnya dioptimalkan. Masih terdapat peluang untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi melalui pemanfaatan fitur sistem yang lebih maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam pengelolaan keuangan belum sepenuhnya mencapai tahap optimal dan memerlukan strategi pengembangan yang berkelanjutan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini juga menyoroti pentingnya forum komunikasi internal sebagai sarana evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Pertemuan rutin antara manajemen dan staf dinilai dapat menjadi wadah untuk membahas kendala, berbagi pengalaman, serta merumuskan solusi secara kolektif. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan budaya organisasi yang kolaboratif dan adaptif terhadap perubahan sistem.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem keuangan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia telah berjalan ke arah yang positif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan barang milik negara. Namun demikian, optimalisasi sistem masih memerlukan dukungan pada aspek peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan peran manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal. Dengan upaya yang berkelanjutan, diharapkan kualitas laporan keuangan dan pengelolaan aset negara di lingkungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dapat semakin meningkat dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem keuangan terintegrasi dalam pengelolaan barang milik negara di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia serta dampaknya terhadap kualitas pelaporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem keuangan yang baru telah berhasil meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta keandalan informasi aset melalui integrasi data antara aplikasi keuangan dan penatausahaan barang milik negara. Hal ini menjawab tujuan penelitian bahwa sistem terintegrasi berperan signifikan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan aset. Namun demikian, efektivitas implementasi sistem masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pemahaman sumber daya manusia terhadap prosedur dan aplikasi baru, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi. Oleh karena itu, keberhasilan sistem tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh dukungan manajemen, kompetensi SDM, serta kualitas komunikasi internal organisasi (Nugroho & Firdaus, 2025). Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan berkelanjutan dalam aspek pelatihan, integrasi sistem, dan komitmen manajerial merupakan kunci utama dalam mencapai tata kelola keuangan dan aset negara yang lebih baik.

Berdasarkan temuan penelitian, rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan adalah perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis yang berkelanjutan dan terstruktur, khususnya terkait penggunaan aplikasi keuangan, pemahaman regulasi, dan standar akuntansi pemerintahan. Selain itu, instansi perlu memperkuat sistem

pengendalian internal melalui monitoring, evaluasi berkala, serta penerapan audit berbasis risiko guna menjamin keandalan data aset. Pengembangan dan pemeliharaan integrasi sistem aplikasi keuangan dan penatausahaan barang milik negara juga harus menjadi prioritas strategis agar data yang dihasilkan tetap akurat, konsisten, dan terhindar dari duplikasi. Di sisi manajerial, diperlukan peningkatan keterlibatan pimpinan dalam proses sosialisasi dan implementasi sistem, serta penguatan komunikasi internal melalui forum diskusi rutin guna mempercepat adaptasi organisasi. Terakhir, disarankan adanya penelitian lanjutan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang sistem keuangan terhadap kinerja organisasi, sehingga dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan yang lebih komprehensif di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, N. K. (2024). PERANAN PERPUSTAKAAN SEBAGAI SUMBER DAYA PEMBELAJARAN DALAM MENINGKATKAN LITERASI DI ERA DIGITAL. *JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK*, 1(4), 29–37. <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i4.1870>
- ARIF ANGGARA. (2023). *PEMANFAATAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN LITERASI KEAGAMAAN SISWA KELAS 8 (SMP) NEGERI 1 DUKUPUNTANG* [Diploma, S1-PENDIDIKAN GURU RAUDHATUL ATHFAL IAIN SYEKH NUR JATI CIREBON]. <https://syekhnurjati.ac.id>
- CMA, D. S. J. H., SE, M. Si. (2024). *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Dahlia, N. (2021). Studi Tentang Proses Pengembangan Koleksi pada Perpustakaan STITMA YOGYAKARTA. *Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan*, 9(2), 14–16. <https://doi.org/10.24036/113163-0934>
- Edowai, Y. (2021). *IMPLEMENTASI PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS IVET SEBAGAI PUSAT SUMBER BELAJAR BAGI MAHASISWA* [Masters, Universitas Ivet]. <https://eprint.ivet.ac.id/id/eprint/560/>
- Fadirah, A. N., Utamingtyas, T. H., & Khairunnisa, H. (2025). Analisis Pengendalian Internal dalam Perencanaan Aset Barang Milik Negara oleh Kantor Pusat DJBC. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 6(1), 159–169. <https://doi.org/10.21009/japa.0601.12>
- Fadirubun, N. R. (2024). *Penerapan Manajemen Perpustakaan Sekolah Dalam Mengoptimalkan Layanan Perpustakaan Pada SMA Negeri 11 Ambon* [Skripsi, IAIN AMBON]. <http://repository.iainambon.ac.id/4527/>
- Fatmawati, E. (2021). *Layanan Perpustakaan Sekolah: Panduan Bagi Pemula*. Deepublish.
- Firdaus, A., Saefullah, A., Noviar, E., & Asmana, Y. (2022). Pendidikan Dan Pelatihan yang Mempengaruhi Profesionalisme Guru: Studi Kualitatif Manajemen Sekolah. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia*, 1(3), 39–46. <https://doi.org/10.55542/jppmi.v1i3.271>
- Hadyan, H., & Primastuti, A. (2025). *KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP OPINI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DI KOTA BEKASI* [Diploma, IPDN]. <http://eprints.ipdn.ac.id/21238/>

- Hakim, L. N., & Hadiapurwa, A. (2022). Pergeseran Bentuk Layanan Perpustakaan dan Peran Pustakawan Dalam Konsep Libraries Without Walls. *Pustakaloka*, 14(1), 109–125. <https://doi.org/10.21154/pustakaloka.v14i1.3569>
- Helmy, M. W. (2022). *Standardisasi Pengelolaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bondowoso Tahun 2022* [Undergraduate, UIN KH Achmad Siddiq Jember]. <https://digilib.uinkhas.ac.id/9697/>
- Hiplunudin, A. (2025). *Kebijakan, Birokrasi, dan Pelayanan Publik: Tinjauan Kritis Ilmu Administrasi Negara*. Penerbit Andi.
- Kusmawati, & Anas, M. (2021). Rancangan Sistem Otomasi Perpustakaan Berbasis Web dengan Menggunakan “Slims 9.0” Pada politeknik Pariwisata Makassar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer Fakultas Ilmu Komputer Universitas Al Asyariah Mandar*, 7(1), 32–37. <https://doi.org/10.35329/jiik.v7i1.183>
- Ma’ruf, M. K. A., Rahman, A. Z., Adiningtyas, R., Ananda, A., & Fauzi, I. (2024). Optimalisasi Peran Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Berdasarkan Konsep Good Governance. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 4(2), 159–179. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v4i2.613>
- Noor, N. A. (2025). *Analisis dan Implementasi Kendali Otomatis Coal Feeder PLC untuk Stabilitas Pembakaran dan Efisiensi PLTU Tarjun* [Diploma, Institut Teknologi PLN]. <https://repository.itpln.ac.id/id/eprint/6057/>
- Nugraha, H. (2013). Perpustakaan Dan Pelestarian Kebudayaan. *UNILIB : Jurnal Perpustakaan*, 50–62.
- Nugroho, P. A., & Firdaus, A. (2025). Strategi MSDM Mengatasi Keterlambatan Proyek di Teaching Factory. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen & Bisnis*, 3(4), 173–183. <https://doi.org/10.60023/ab3vwm81>
- Pandini, I., Nugroho, M., & Arifin, M. (2025). Analisis Kualitas Informasi Akuntansi Dan Risiko Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Di Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Jatim. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 6(1). <https://doi.org/10.32815/jubis.v6i1.2581>
- Pratama, R. F. (2025). *PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Kuningan)* [Diploma, Universitas Kuningan]. <https://rama.uniku.ac.id/>
- Prayogo, Y., Fikri, A. S., & Nandini, K. P. (2023). Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrua dalam Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah. *Dinamika: Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi*, 3(2), 44–58. <https://doi.org/10.51903/dinamika.v3i2.380>
- Rachman, Y. S. (2023). *ANALISIS PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA ALAT KONSTRUKSI MELALUI MEKANISME PENJUALAN DALAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET (STUDI KASUS PADA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SULAWESI SELATAN) = ANALYSIS OF DISPOSAL OF GOVERNMENT-OWNED CONSTRUCTION ASSETS*

THROUGH SALES MECHANISM IN ASSET MANAGEMENT OPTIMIZATION (A CASE STUDY AT THE SOUTH SULAWESI REGIONAL OFFICE OF THE NATIONAL ROAD IMPLEMENTING AGENCY) [Masters, Universitas Hasanuddin].

<https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/31391/>

Rahma, E. (2018). *Akses dan Layanan Perpustakaan: Teori dan Aplikasi*. Kencana.

Rochmah, E. A. (2016). Pengelolaan Layanan Perpustakaan. *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2), 277–292. <https://doi.org/10.21274/taalum.2016.4.2.277-292>

Sitanggang, J. Y. B., Tohang, L. B., Simatupang, Y., & Nasirwan, N. (2025). Hambatan dan Inovasi Dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Laporan Keuangan. *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, 2(2), 790–797. <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i2.4188>

Wibisono, khairunnisa A. F., & Wibisono, A. F. (2024). Efektivitas Pemahaman Standar Akuntansi Sektor Publik terhadap Proses Penyusunan Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten XYZ. *Economic Reviews Journal*, 3(3), 979–986. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i3.236>

Widi Widayat, N. 2343021068. (2026). *Strategi Optimalisasi Barang Milik Negara Berupa Properti Umum pada Lembaga Manajemen Aset Negara* [Masters, Politeknik STIA LAN Jakarta]. <https://repository.stialan.ac.id/id/eprint/918/>

Yalabi, D. A. (2021). KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *Jurnal Pitis AKP*, 5(2), 123–129. <https://doi.org/10.32531/jakp.v5i2.667>